LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN OKTOBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 8 November 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 79,11 %

b. Keuangan = 17.238.157.548 (76,91%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.300.000			13.980.000		
1	Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah	21.300.000	69,73	65,59	13.980.000	(4,14)	Perubahan Anggaran pelaksanaan di Bulan November dan Desember
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000			152.280.000		

1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.000.000	79,60	77,89	152.280.000	(1,71)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.380.000			0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Kantor	35.380.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan Di bulan desember
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.550.000			2.700.000		
1	Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.550.000	12	2,44	2.700.000	(9,56)	Tidak ada kegiatan, menunggu perubahan disahkan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	44.320.000			28.118.898		
1	Konsultasi PUG	44.320.000	80,36	51,40	28.118.898	(28,96)	Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	31.935.000			16.581.200		
1	Pembinaan dan Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota	31.935.000	83,35	47,41	16.581.200	(35,94)	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	40.985.000			26.461.500		
1	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota	40.985.000	64,62	64,56	26.461.500	(0,06)	

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	13.250.000			10.500.000		
1	Fasilitasi Partisipasi Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	13.250.000	80	79,50	10.500.000	(0,50)	
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	8	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SMA/K untuk perkembangan implementasinya sambil menyesuaikan pembaharuan MoU menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian BKKBN (Dalduk);
2. Hasil Penilaian KLA dilaksanakan tahun 2025 (PHA)

Upaya

1. Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Jateng (Dalduk);

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. FGD Kampung KB (Dalduk)
2. Monev/advokasi Kampung KB (Dalduk)
3. Monev/advokasi penyusunan dokumen GDPK (Dalduk)
4. In House Training Bagi Lembaga Penyedia Layanan di Semarang (PP)
5. Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab/Kota di Semarang (PP)
6. Fasilitasi implementasi Jogo Konco di Tingkat Masyarakat di Kab. Magelang (PHA)
7. Rakor KLA di Semarang (PHA)
8. Peningkatan Kapasitas Fasilitator Sebaya untuk mendukung Jogo Konco dan Jo Kawin Bocah (PHA)
9. Monev Pelatihan Kader PATBM di kab. magelang (PA)
10. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD)
11. Sosialisasi jo kawin bocah melalui kelompok PIK R di kampung KB (KS)
12. Sosialisasi tribina dan uppka dalam upaya penurunan angka stunting (KS)
13. Advokasi KB bersama mitra (PKK) di kab. Karanganyar (KIE)
14. Peningkatan kapasitas PPKBD di kab. Semarang (KB)
15. Safari Pelayanan KB di kab. Klaten, kab. Boyolali, kab. Semarang, kab. Batang (KB)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Oktober 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 8 November 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001